

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR 132TAHUN 2015  
TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG  
(Studi Terminal Raja Basa Tipe A)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**KHUSNUL ZANNAH  
1521020224  
Jurusan : Siyasa Syar'iyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR 132TAHUN 2015  
TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG  
(Studi di Terminal Raja Basa Tipe A)**

**Skripsi**

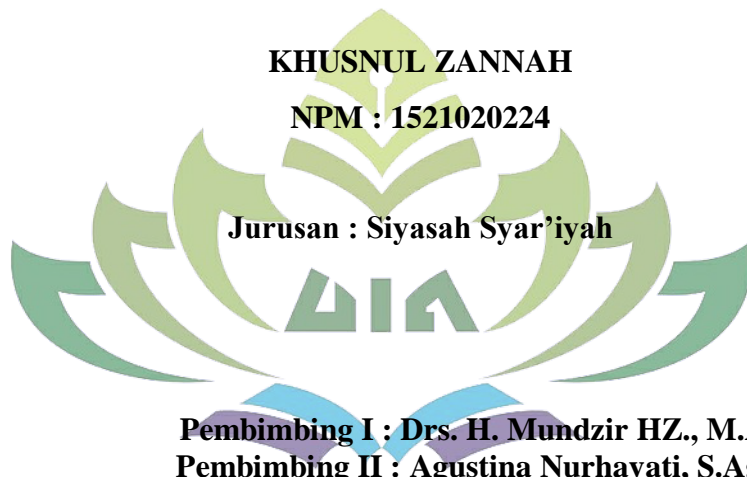
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**KHUSNUL ZANNAH**

**NPM : 1521020224**

**Jurusan : Siyasa Syar'iyah**



**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Banyak sarana dan prasarana transportasi di Bandar Lampung, tetapi dalam pengelolaannya belum baik. Salah satunya adalah pengelolaan terminal penumpang yang perlu pembenahan baik dalam sistem pengelolaan sampai pada teknis pelaksanaan operasionalnya. Tidak tertibnya pengaturan di dalam terminal dan tingginya angka kriminalitas menjadi faktor utama yang perlu segera diselesaikan oleh UPTD (Unit pelaksana teknis dinas) terminal induk Kota Bandar Lampung sebagai bentuk respons aktif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di terminal Rajabasa Tipe A dan bagaimana Implementasi pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di terminal Rajabasa Tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di terminal Rajabasa Tipe A dan untuk mengetahui Implementasi pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

Metode penelitian yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil peneliti melalui teknis pengumpulan data di atas. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.

Implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A masih Kurang memadai dan mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jika dikaitkan dengan *Fiqh Siyasah* maka Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A, masih belum baik dimana pengelolaan terminal penumpang Tipe A harus mampu mengelola dan bertanggung jawab dengan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Zannah

NPM : 1521020224

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG” (Studi Di Terminal Rajabasa Tipe A)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2020  
Penulis,

Khusnul Zannah  
NPM. 1521020224





**Judul Skripsi :** **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN  
2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL  
PENUMPANG (Studi di Terminal Rajabasa  
Tipe A)**

**Nama :** **KHUSNUL ZANNAH**  
**NMP :** **1521020224**  
**Jurusan :** **Hukum Tata Negara**  
**Fakultas :** **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

**Drs.H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**NIP.195607271988031001**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**NIP.197408162003122004**

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP.197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG"** (Studi di Terminal Rajabasa Tipe A) disusun oleh, **KHUSNUH ZANNAH**, NPM : 1521020224, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal : 31 Desember 2019

**Tim Penguji**

**Ketua**

: **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris**

: **Erik R Gumiri, M.H.** (.....)

**Penguji Utama**

: **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.** (.....)

**Penguji I**

: **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.** (.....)

**Penguji II**

: **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Mengetahui**

**Rektor Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Kholiduddin, M.H.**

NIP. 19610221993031002





## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

(Qs. An-Nisa [4]:58)



## PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Kamdan dan Ibu tercinta Kartini, terima kasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu Korbakan untukku, terima kasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terima kasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terima kasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Saudara kandungku Khotimah, Fitriani, Fir Daus, Hikmah Sari, terima kasih atas segala do'a dukungan semangat motivasi dan kasih sayang kalian.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
4. Almamater tercinta.



## **RIWAYAT HIDUP**

Khusnul Zannah dilahirkan dipekon Penanggungan pada tanggal 01 januari 1996. Penulis merupakan Anak Kelima dari Lima bersaudara pasangan Bapak Kamdan dengan Ibu Kartini.

Penulis Menyelesaikan Pendidikan :

1. SD Waykamal diselesaikan Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Kota Agung Barat diselesaikan tahun 2011
3. SMA Muhammadiyah Kota Agung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2014.
4. Tahun 2015, Penulis diterima Sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syariah Program Studi Siyasah. (Hukum Tata Negara).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rasa Syukur yang tak terhingga kepada yang Maha Agung, Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG**” Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri,. M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bpk. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H. dan Frenki, M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag. selaku pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu



untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Para sahabat Irma Asmah Mawadati, Devi Apriyani, Isti Khorotus Solehah, Meri Kurniati dan Elli Setiawati yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
7. Teman seperjuangan Siyasah C yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Team Kost Putri Naya terbaik Putri Bima Cipta, Umi Sita Rami, Tika Ardiyani, Novita, Susi, Yuli, Fera, Devi, Septiana, Riska, Asriana Elsa dan untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Almamater Tercinta.

Akhirnya, hanya kepada Allah AWT penulis penulis serahkan segalanya, muda-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung,      Desember 2019

Penulis,

Khusnul Zannah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian .....	12

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	20
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	27
3. Tujuan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	31
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 .....	49
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang .....	49
2. Pengertian Fasilitas Terminal .....	52
C. Tinjauan Pustaka .....	55

### BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	56
1. Sejarah Terminal Raja Basa.....	56
2. Visi Misi Terminal Raja Basa .....	57
3. Struktur Organisasi Terminal Raja Basa .....	58
B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Raja Basa tipe A .....	60



#### **BABIV. ANALISIS**

- A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 22 ayat (3)  
Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal  
Penumpang di Terminal Raja Basa Tipe A ..... 71
- B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132  
Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang  
di Terminal Raja Basa tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah* ..... 75

#### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Rekomendasi ..... 81

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Guna mempelajari perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (STUDI DI TERMINAL RAJABASA TIPE A)**

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan menurut kamus besar Indonesia yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>

#### **2. *Fiqh Siyasah***

*Fiqh Siyasah* adalah sudut pandang salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

#### **3. Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dapatermen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h.3-4.



#### 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.<sup>4</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini sebagai berikut :

##### 1. Alasan objektif

- a. Berdasarkan fakta bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (3) tentang fasilitas terminal Penumpang, harus ada fasilitas yang memadai yang bersih tetapi pada pelaksanaannya belum sepenuhnya direnovasi dan banyak fasilitas yang kurang memadai seperti fasilitas toilet, fasilitas kebersihan, perawatan terminal, janitor, fasilitas perdagangan, fasilitas keamanan inilah yang membuat penumpang kurang nyaman di terminal.
- b. Kajian tentang fasilitas terminal penumpang dibahas karena sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, demi mengetahui

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, h. 352.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun Tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkut jalan tersegera di [Http://hubdat dephub. Go.id/km/tahun-2015/1818](http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2015/1818) (27 Agustus 2015), h. 1.

pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari'ahan khususnya sesuai dengan Jurusan *Siyasah*.

## C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam *Fiqh Siyasah* dikenal dengan istilah *Siyasah Dusturiyah*, yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>5</sup>

Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu sistem transportasi masal yang dapat mengimbangnya. Supaya terminal

---

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media, 2014), h. 3.

benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum yang memanfaatkan terminal maupun masyarakat pengguna sarana, prasarana, fasilitas yang ada di dalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapat kepada daerah, maka perlu dikelola sebaik-baiknya, profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman pengelolaan fasilitas terminal yang baik pengelolaan atau fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi yang lancar dan nyaman merupakan hal mutlak yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor perhubungan.<sup>7</sup> Banyak sarana dan prasarana transportasi di Bandar Lampung, tetapi dalam pengelolaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satunya adalah pengelolaan terminal penumpang yang perlu pembenahan baik dalam sistem pengelolaan sampai pada teknis pelaksanaan operasionalnya. Tidak tertibnya pengaturan di dalam terminal dan tingginya angka kriminalitas menjadi faktor utama yang perlu segera diselesaikan oleh UPTD (Unit pelaksana teknis dinas) terminal induk Kota Bandar Lampung sebagai bentuk respons aktif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayu Media, 2011), h. 89.

<sup>7</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan)*. (Jakarta: LP3ES: 2008), h. 90.



Provinsi Lampung terdapat 17 terminal Bus dengan beberapa Kabupaten/Kota dengan pembagian sebagai berikut :

1. Terminal tipe A : 1 buah, yaitu Terminal Rajabasa
2. Terminal tipe B : 7 buah, yaitu terminal muliojati, kota bumi, menggala, prengsewu, krui, bandar jaya, panjang, kota agung, bukit kemuning dan liwa.
3. Terminal tipe C : 9 buah, yaitu kemiling, pasar bawah, sukaraja, Kalianda, Metro, kali cinta, pasar dekon, simpang propau, way kenong.

Adapun terminal Penumpang dengan pembagian/ perincian di atas, maka Terminal yang ada di Bandar Lampung mempunyai pembagian beberapa tipe:

- a. Terminal tipe A : Terminal induk Rajabasa.
- b. Terminal tipe B : Terminal panjang.
- c. Terminal tipe C : Terminal Kemiling Pasar Bawah dan Sukaraja.

Arus transportasi penumpang yang semakin padat dan kuantitas dari pengguna angkutan transportasi darat antar kota dan provinsi yang semakin berkembang baik dalam kota maupun, antar provinsi sebaiknya disikapi dengan baik oleh UPTD Terminal Kota Bandar Lampung dengan meningkatkan kualitas infrastruktur terminal angkutan penumpang yang ada sebagai bentuk tanggapan terhadap situasi yang sedang berkembang.

Fungsi terminal yang sangat urgen sebagai media Transfortasi masyarakat dalam mengakses sarana angkutan umum (penumpang) menjadikan terminal penting untuk dikelola secara profesional dengan

berbagai macam fasilitas pendukung kenyamanan bagi penggunaannya. Banyaknya Terminal di Provinsi Lampung yang sebagian besar di Bandar Lampung merupakan aset penting daerah yang harus dikelola dengan baik agar dalam pemanfaatannya bisa tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pasal 22 ayat (3) yang membahas bagian tentang fasilitas umum sebagai berikut:

1) huruf a. Fasilitas toilet

Toilet berarti kamar kecil (kaskus) atau tempat untuk mencuci tangan dan mencuci muka.<sup>8</sup> Sedangkan berdasarkan buku Standart Toilet Umum Indonesia, Toilet berarti tempat atau fasilitas sanitasi yang digunakan manusia untuk buang air besar maupun kecil, tempat untuk mencuci tangan serta mencuci muka.<sup>9</sup> Toilet juga diartikan sebagai fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang pada bangunan.<sup>10</sup>

2) huruf f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor.

Fasilitas Keamanan di dalam terminal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghindari *crossing* antara arus armada dengan manusia.
- b. Penciptaan suasana yang dapat menghalangi tindak kejahatan terhadap penumpang.
- c. Ada arus pergerakan kendaraan yang searah, kejelasan pembagian jalur arah yang berjalan dan tidak terjadi *crossing*.

<sup>8</sup> Setyawan, Ebta. 2011. *KBBI Offline Versi 1.2*. <http://ebtasoft.web.id>

<sup>9</sup> Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2004. *Standart Toilet Umum Indonesia “Kering Itu Sehat”*. h. 4.

<sup>10</sup> Lubis, Hendra Arief K.H. 2008. *Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus : Lapangan Merdeka*. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/4350/1/09E00136.pdf>

3) huruf h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi.

Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh pengemudi maupun oleh penumpang yang menggunakan fasilitas terminal.

4) huruf o. Fasilitas keamanan.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan keamanan dan keselamatan, perancangan kawasan tidak langsung mengatasi permasalahannya namun hanya mengatasi gejala saja. Perancangan kawasan terminal dapat menghasilkan lingkungan dengan tingkat keamanan dan keselamatan tertentu, tapi tidak bisa mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyimpangan sifat dan tingkah laku manusia.

Terminal Induk Rajabasa adalah satu-satunya terminal tipe A di Provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung yang merupakan tempat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Status Terminal Induk Rajabasa sebagai Terminal Induk Provinsi Lampung yang mulai mengalami perkembangan aktivitas kemasyarakatan namun belum memiliki ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari arus pergerakan kendaraan di dalam Terminal yang semeraut dan berbagai permasalahan fasilitas terminal seperti ruang tunggu terminal yang tidak

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, h. 1.



memadai, kurang bersihnya toilet umum di dalam terminal dan kurang kepedulian Terhadap keamanan penumpang di Terminal Rajabasa.<sup>12</sup>

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dalam segala aspek kehidupan haruslah memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam bidang fasilitas guna kenyamanan bagi masyarakat. Tingkat mobilitas yang tinggi serta desakan infrastruktur transportasi yang memadai menyebabkan pemerintah daerah sebagai panutan masyarakat terdorong untuk merespon kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam sarana dan prasarana perhubungan merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mengoptimalkan semua aset perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung. UPTD (unit pelaksana teknis dinas ) terminal merupakan unsur penunjang sebagai tugas Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang terminal. Terminal bus yang berada di Kota Bandar Lampung adalah terminal Rajabasa. Terminal Rajabasa merupakan terminal penumpang tipe A.

Pengelolaan terminal tipe A dimana harus sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang fasilitas Terminal Penumpang. Terminal sebagai tempat awal dan akhir kegiatan perjalanan serta tempat pergantian moda transportasi menuntut adanya sistem

---

<sup>12</sup> Christmas T.S. Kandau, Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No. 1, Januari 2019, h.87.

pengelolaan yang terpadu. Keterpaduan berbagai aspek administrasi, moda angkutan, kegiatan, dan fungsi akan menghasilkan suatu sistem pergerakan yang teratur dan pasti. Penanganan penumpang jarak jauh (> 100 km) mempunyai cara berbeda dengan penumpang urban dan regional.<sup>13</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An-nisa ayat:58).*<sup>14</sup>

Bahwa amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT. Artinya pengelolaan terminal Bus tipe A harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang. Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Pada kenyataan fasilitas belum juga dibenahi, salah satu fasilitas yang belum juga dilakukan renovasi bagian:

#### a. Fasilitas toilet

<sup>13</sup> Prasetya Sushernawan, *Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014, :<http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

<sup>14</sup> Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, h. 113.

- b. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, monitor.
- c. Fasilitas perdagangan, pertokohan, kantin pengemudi.
- d. Fasilitas keamanan.

Beberapa fasilitas di atas, yang belum mendapatkan renovasi, maka banyak sekali penumpang mengeluhkan terhadap fasilitas yang tak kunjung dibenahi. Fenomena-fenomena yang digambarkan di atas dapat kita lihat bahwa tata kelola terminal induk Rajabasa dilakukan belum dengan baik terlihat dari Sidak Wali Kota Bandar Lampung dan keluhan masyarakat yang dimuat pada surat kabar lokal mengingat pentingnya fungsi terminal sebagai memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan keberadaan terminal induk Rajabasa yang sangat vital fungsinya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tata kelola fasilitas Terminal Rajabasa.<sup>15</sup>

Maka Peneliti menyusun skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (STUDI DI TERMINAL RAJABASA TIPE A)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, diatas maka penelitian ini difokuskan pada Implementasi Praturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, h. 1.

Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal RajaBasa Tipe A. Adapun penelitian ini terdapat sub-sub fokus sebagai berikut:

1. Huruf a. fasilitas toilet
2. Huruf f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan jonitor.
3. Huruf h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi.
4. Huruf o. fasilitas keamanan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A.
2. Bagaimana implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A.
  - b. Untuk mengetahui implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

### b. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pelaksanaan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

## G. Signifikasi Penelitian

- a) Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.
- b) Dalam hal ini merupakan sumbangan terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan atau mencari, menggali, mengolah atau membahas data atau suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1994), h.2.

Dan membahas dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

# 1. Jenis dan sifat penelitian

## a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>17</sup> Disini penulis akan terjun kelapangan dimana penulis akan meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 22 Ayat (3) Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.<sup>18</sup> berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Alimni, 1986), h.33.

<sup>18</sup> Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006), h.274.

## 2. Sumber data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>19</sup>

### a. Data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari tentang penyelenggaraan terminal penumpang terminal angkutan jalan di Kota Bandar Lampung.

### b. Data sekunder

Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, tersebut adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dalam Fasilitas Terminal Penumpang Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

---

<sup>19</sup> Moh. Pabundatika, *Metodelogi Ristrach Bisnis* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), h.57.

#### a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.<sup>20</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>21</sup> bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>22</sup>

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi dua yaitu *probabilitas sampling* dan *nonprobabilitas sampling*.<sup>23</sup> Sampel yang akan digunakan oleh penelitian adalah menggunakan *nonprobabilitas sampling* dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung

---

<sup>20</sup> Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), h.34.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), H.173-174.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h.118.

<sup>23</sup> *Ibid.* h.218.



diwawancara.<sup>24</sup> Sampel yang akan digunakan dipenelitian ini antara lain: Kepala Terminal (1 orang), Sekretaris (1 orang), aparatur (2 orang) dan penumpang (4 orang). Maka sampel berjumlah 8 orang yang dilakukan di Terminal Rajabasa Tipe A Kota Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *interview*/wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang.

##### a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksi makna dalam dalam suatu topik tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode *interview*/wawancara merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan. Didalam Penelitian ini tentunya akan menseleksi yang akan diwawancarai, memang persoalan yang sulit, karena bagi penelitian atau pewawancara yang baru pertama kali berada di dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu, belum mengenai individu atau informasi mana yang akan diwawancarai. Namun untuk mengatasi kesulitan tersebut, penelitian atau

---

<sup>24</sup> Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum cetakan ke-6*, (Jakarta:Rajawali Pers 2012), h.107.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.188.

pewawancara melalui dengan seorang informasi pangkal (*key informan*)<sup>26</sup>.

#### b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>27</sup>

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan penetapan metode observasi nonpartisipasi, dimana penelitian berlaku sebagai sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan.<sup>28</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana Permenhub RI Kota Bandar Lampung yang dilakukan Dinas Perhubungan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data atau fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit* h.83.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan ke-3, (Bandung: Alfabet, 2013), h.196.

<sup>28</sup> Sutrisno dan Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.151.

Dokumentasi gambaran berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya dapat berupa gambar, patung film, dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi.

## 5. Pengelolaan data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>29</sup> Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

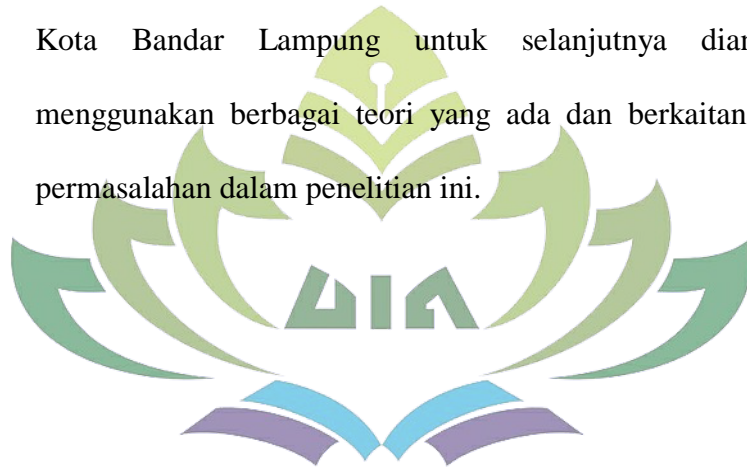
- a. Pemeriksaan data (*editing*,) pengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. penandaan data (*coding*,) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011),h.141.

<sup>30</sup> Abduk Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h.126.

## 6. Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>31</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi paktual yang diperoleh dari aparatur Dinas Kementrian Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



---

<sup>31</sup>*Ibid.* h.127.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.<sup>32</sup> *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al Qur’an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”<sup>33</sup>

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 2.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>34</sup> Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), h. 9.

dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

*Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>36</sup>

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>37</sup>

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>38</sup> Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>37</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 49.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 50.

dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.<sup>39</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,<sup>40</sup> guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.<sup>41</sup> Sementara Louis Ma'uluf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>40</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 49

- b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>42</sup>
- c. Adapula istilah *al-siyasah al-syar'iyyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai *al-siyasah syar'iyyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali<sup>43</sup> mengatakan, "*al-siyasah al-syar'iyyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu".

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *al-siyasah as-syar'iyyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>43</sup> Beliau adalah Ali Bin 'Aqil bin Muhammad Abu al-Wafa' Al-Zihari, salah seorang tokoh terkenal satu-satunya di zamannya, alim, penulis cerdas. Menulis kitab yang sangat masyhur, "*AL Funun*" lebih dari 400 jilid. Sayangnya beliau menyelisihi manhaj salaf dan sejalan dengan manhaj mu'tazilah dalam banyak hal. Namun setelah itu beliau mengumumkan taubatnya dari manhaj Mu'tazilah serta menulis buku yang membantah mereka. Dalam *Rapung Samuddin*, h. 50.



pemimpin untuk sebuah *maslahat* yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, “ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari‘at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasat syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *Siyasat Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.<sup>44</sup>

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu :

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 4.

- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al- amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.<sup>45</sup>

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*)<sup>46</sup>

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 7.

wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.<sup>47</sup>

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.<sup>48</sup>

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyasah*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali.

Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-nisa ayat:58).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298. Yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 57

<sup>48</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. 1, h. 297-298

<sup>49</sup> Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, h. 113.

*Fiqh siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.<sup>50</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam al-Sulthaniyat* ada 5 (lima) macam:<sup>51</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan):

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-undang)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

<sup>50</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2, h. 3

<sup>51</sup> Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak. 2014), h. 43.

- f. *Siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>52</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.<sup>53</sup>

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *waliyatul ahdi*
- 5) Persoalan perwakilan
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>53</sup> Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta, Ombak. 2014), h. 43.

<sup>54</sup> Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah*, h. 32.



b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al- Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).<sup>55</sup> Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi :

- 1) Persoalan internasional
- 2) *Territorial*
- 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran,
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang *dzimmi*
- 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.<sup>56</sup>

c. *Fiqh siyasah maaliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara

---

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, h. 251.

<sup>56</sup> Suyuthi Pulungan, h.44.

2) Pengeluaran dan belanja negara

3) *Baitul maal* dan fungsinya.<sup>57</sup>

d. *Fiqh siyasah harbiyah*

1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam

2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan

3) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan,

4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.<sup>58</sup>

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu:

a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*al-mulk at-taba'i*)

b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyasi*).<sup>59</sup>

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan Sunnah,

<sup>57</sup> Suyuthi Pulungan, h. 44.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>59</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor. Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 13.

akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua*, Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga*, Negara ala republik Plato (*al-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

### 3. Tujuan *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etomologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>60</sup>

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasaannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah*

---

<sup>60</sup> Ibnu Syarif, Muja dan Zada, Khamami, *fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31

*dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kekenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.<sup>61</sup>

Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun Hadist, *maqasidu syariah*, dan mangat ajarat Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam

<sup>61</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. 1, h. 276

<sup>62</sup> H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48.

batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahli ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran, yaitu (QS: At-Taubah Ayat: 8)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: *Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).*<sup>63</sup>

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987), h. 55.



keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'i dan kedua bersifat siyasi.

Al-Marwadi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta *baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>64</sup>

Hak yang ke tiga ini pada masa abu bakar, diceritakan bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya di beri gaji 6.000 dirham setahun,<sup>65</sup> dan menurut yang lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>66</sup>

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberikan gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk di taati dan untuk dibantu misalnya adalah

---

<sup>64</sup> Al Mawardi, "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*", Musthafa al-'Arabi al-Halabi, Mesir, h. 15-16.

<sup>65</sup> Abdul Qadir Audah, "*Al islam Wa Audlo'una Asiyasiyah Darul Qitab Al Arabi*" Al Qhahirah, 1951, h. 189.

<sup>66</sup> Yusuf Musa, "*Nidham al-Hukmi fi al-Islam*", Darul Kitabi Arabi, al-Qhahirah, 1963, H. 12.

kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-qur'an.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interestnya* pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-Mawardi antara lain:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>67</sup>

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.<sup>68</sup> Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>68</sup> Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi. 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition. International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2012], h. 141.

asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain.

Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libya, Irak (konstitusi 1990) Mauritania dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bai'at (*mubayah'ah*), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh *ahal al-hall wa al-aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.<sup>69</sup> Bai'at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Anshar memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, "Saya nasihatkan kepadamu untuk membai'at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar". Disamping itu kata-kata Bai'at ternyata tidak selamanya sama. Oleh karena itu, lafal Bai'at dapat dibuat sesuai kebutuhan dan lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Alqur'an dan sunnah Rasulullah.

---

<sup>69</sup> T.M. Hasbi Siddiqy, "Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam" Matahari Masa Yogya, 1969, H. 66.

Secara bahasa *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. 'Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merumuskan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-i khtiyar*<sup>70</sup>, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-I jma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-I jti had*. Istilah yang lebih populer di pakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

---

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 138.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.<sup>71</sup>

Ada pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*, yaitu:

- a. *An-Nawawi dalam Al-Minhaj Ahl Halli' wa al-'Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.*
- b. *Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al'aqdi dengan ulil amri yang di sebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59.<sup>72</sup> Ia menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.<sup>73</sup>*
- c. *Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi . Ia menyatakan kumpulan ulil amri dan mereka*

<sup>71</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Grani t, 2004), h. 74.

<sup>72</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 180.

<sup>73</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 181.



yang disebut *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.<sup>74</sup>

- d. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* dan *ulil amri* yaitu para pemimpin dan penguasa.<sup>75</sup>
- e. Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.<sup>76</sup>
- f. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.<sup>77</sup>

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.<sup>78</sup> Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar *Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi* dalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum

<sup>74</sup> Muhammad, *Dhiya al-Din al-Rayis*, h. 167-168.

<sup>75</sup> Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi*, Jilid V, *Dar al- Fikr*, h.149

<sup>76</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, *Marhabat Mshtafa al-Bat al-Halabi*, *Mishr* 1389/1979, h. 72-73

<sup>77</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, h. 6

<sup>78</sup> Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), h. 208.

atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.<sup>79</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Alquran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan *Ulil Amri*.

*Ulil amri* adalah istilah syar'i yang terdapat didalam Al-quran. *Ulil amri* dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan

<sup>79</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 87.

tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi*.

Adanya dasar *Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.<sup>80</sup> Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

---

<sup>80</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h 92.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.<sup>81</sup>

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);

- 1) *Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.*
- 2) *Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.*
- 3) *Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.*
- 4) *Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.*
- 5) *Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid).*
- 6) *Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.*
- 7) *Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.*

---

<sup>81</sup> Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokras*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 74.

- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat. Allah Ta'ala berfirman;

يٰۤاٰدٰوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “ Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (Shaad: 26).

Pada ayat diatas Allah SWT tidak hanya memerintahkan pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan langsung. Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, maka ia masuk kategori orang tersesat. Inilah kendati pelimpahan tugas dibenarkan berdasarkan hukum agama dan tugas

pemimpin, ia termasuk hak politik setiap pemimpin. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara- perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Menurut Al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa' al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *mala yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tu juga hukumannya wajib).<sup>82</sup>

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang

---

<sup>82</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h. 5.



untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.<sup>83</sup>

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independen. Ini mengakibatkan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 7.

Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya. Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl al-ikhtiyar. Mereka melakukan bay'ah terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.<sup>85</sup>

Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:

- a) Memelihara Agama.
- b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
- c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
- d) Menegakkan hudud.
- e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.

---

<sup>85</sup> Pandangan ini lebih maju beberapa abad sebelum pemikir-pemikir politik barat seperti John Locke, J. J. Rousseau dan Montesqieu merumuskan teori-teori kontrak sosial pada abad ke-17 dan 18 M.

- f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak.
- g) Memungut harta *fa'i* dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- h) Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
- i) Menyampaikan amanah.
- j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama.<sup>86</sup>

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, Al-Mawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtatan dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus. Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan dijalur agama.<sup>87</sup>

Namun Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya umat taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terdapat salah satu dari tiga hal, yaitu:<sup>88</sup>

- (1) Menyimpang dari keadilan (berbuat fasik)

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>87</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, terjemahan Ibrahim Syu'aib, *Etika Agama dan Dunia*, h. 100-101.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 102.

- (2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
- (3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.

Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memegang jabatannya lagi. Namun demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi panca indra kepala negara tidak serta-merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan rakyat kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan, karena hal ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak mengakibatkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan rakyat kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Adapun hilangnya kemampuan mendengar bicara, menurut Al-Mawardi, masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian menghilangkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan tidak.

## **B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015**

### **1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang**

Fasilitas terminal merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengoperasian sebuah terminal. menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang terdiri atas:

1. Fasilitas utama terminal yang terdiri dari :
  - a. Jalur keberangkatan kendaraan.
  - b. Jalur kedatangan kendaraan.
  - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput.
  - d. Tempat parkir kendaraan.
  - e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*).
  - f. Perlengkapan jalan.
  - g. Fasilitas penggunaan teknologi.
  - h. Media informasi.
  - i. Penanganan pengemudi.
  - j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*costumer service*).
  - k. Fasilitas pengawasan keselamatan.
  - l. Jalur kedatangan penumpang.
  - m. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*).

- n. Ruang pembelian tiket.
  - o. Ruang pembelian tiket untuk bersama.
  - p. *Outlet* pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*).
  - q. Pusat informasi (*information center*).
  - r. Papan perambuan dalam terminal (*signage*).
  - s. Papan pengumuman.
  - t. Layanan bagasi (*lost and found*).
  - u. Ruang penitipan barang (*lockers*).
  - v. Tempat berkumpul darurat (*assembly point*).
  - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
2. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal antara lain :
- a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui
  - b. Fasilitas keamanan (*checking point/metal detector, CCTV*).
  - c. Fasilitas pelayanan keamanan.
  - d. Fasilitas istirahat awak kendaraan.
  - e. Fasilitas *ramp check*.
  - f. Fasilitas pengendapan kendaraan.
  - g. Fasilitas bengkel diperuntukkan bagi operasional bus.
  - h. Fasilitas kesehatan.
  - i. Fasilitas peribadatan.
  - j. Tempat transit penumpang (*hall*).



- k. Alat pemadam kebakaran. dan/ atau
- l. fasilitas umum.
- 3. Fasilitas umum meliputi :
  - a. Toilet.
  - b. Fasilitas *park and ride*.
  - c. Tempat istirahat awak kendaraan.
  - d. Fasilitas reduksi pencemaran udara dan kebisingan.
  - e. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang.
  - f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor* (pembersih Kantor).
  - g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum.
  - h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi.
  - i. Area merokok.
  - j. Fasilitas restoran.
  - k. Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM).
  - l. Fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut).
  - m. Fasilitas telekomunikasi dan area jaringan internet.
  - n. Fasilitas penginapan.
  - o. Fasilitas keamanan.
  - p. Ruang anak-anak.
  - q. Media pengaduan layanan. dan/ atau

r. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.<sup>89</sup>

## 2. Pengertian Fasilitas Terminal

Terminal penumpang merupakan bagian dari sistem transportasi dan secara umum berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Efektifitas terminal baik dalam hal kenyamanan pelayanan ataupun kecepatan pergerakan penumpang sangat menentukan kapasitas sebuah terminal. Perencanaan kapasitas terminal harus disesuaikan dengan perkembangan yang akan datang. Kapasitas yang ada harus memperhitungkan moda transportasi yang akan digunakan penumpang, fasilitas yang ada serta tinjauan dari segi manajemen lalu lintas di lokasi terminal. Untuk mengetahui kapasitas suatu terminal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan teori antrian.

Fasilitas terminal terbagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan penunjang. Fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang yaitu:

### a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum

Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.

---

<sup>89</sup> Abubakar, dkk. *Menuju Lalu Lintas yang Tertib. Kumpulan Materi & Petunjuk Teknis Lalu Lintas & Angkutan Jalan*. (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2005), h. 25..

b. Jalur kedatangan kendaraan umum

Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

c. Tempat tunggu kendaraan umum

Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap menuju jalur pemberangkatan.

d. Bangunan kantor terminal dan menara pengawas

Bangunan kantor terminal adalah bangunan yang biasanya berada dalam wilayah terminal, yang biasanya digabung dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai tempat memantau pergerakan kendaraan dan penumpang.

e. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar

Tempat tunggu penumpang atau pengantar adalah pelataran yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum atau orang yang mengantarnya.

f. Jalur lintasan

Jalur lintasan adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang akan langsung melakukan perjalanan setelah menurunkan atau menaikkan penumpang.

g. Locket penjualan karcis

Locket penjualan karcis adalah ruangan yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara untuk penjualan tiket yang melayani perjalanan dari terminal yang bersangkutan.

h. Tempat istirahat sementara kendaraan

Tempat istirahat sementara kendaraan adalah tempat bagi kendaraan untuk istirahat sementara dan dilakukan perawatan sebelum melanjutkan pemberangkatan.

i. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal pemberangkatan.<sup>90</sup>

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang menunjang fasilitas utama sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, terdiri atas: kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan lain-lain.

### C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan.

1. Hasil dari penelitian dari Anita Yuniyar tentang Perencanaan Penataan Fasilitas Terminal Tipe C Tagog Padalarang Kabupaten Bandung barat (facilities arrangement plening of C-Tipe Tagog Terminal padalarang

---

<sup>90</sup> Abubakar, dkk. *Menuju Lalu Lintas yang Tertib. Kumpulan Materi & Petunjuk Teknis Lalu Lintas & Angkutan Jalan*. (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2005), h. 25..

kabupaten bandung barat tahun 2017). Adapun hasil evaluasi kinerja terhadap Terminal Tipe C Tagog pada larang yang dilakukan oleh Anita Yuniyar bahwasannya Terminal Tipe C Tagog tersebut memiliki kinerja aspek fisik dan fungsi yang kurang baik yaitu tidak tersediannya Fasilitas yang sesuai dengan standar minimal pelayanan Terminal Penumpang Jalan dan harus dilakukan perencanaan pada sarana yang ada. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang fasilitas yang ada di terminal, dan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini objek yang diteliti yaitu tagog padalarang Fasilitas yang harus ditambahkan menurut Anita Yuniar yaitu ruang parkir, ruang tunggu penumpang, jalur kedatangan dan pemberangkatan pos keamanan, ruang ibu menyusui, alat pemadam kebakaran dan papan informasi yang letakkan disesuaikan dengan pembagian zona yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015. dengan penelitian penulis yaitu lebih terfokuskan kepada Fasilitas Terminal Tipe A sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) ditinjau dari *fiqh siyasah*.

2. Hasil dari penelitian dari Ferry Agus Saputra, pengembangan terminal penumpang terminal bangsri Kec. Bangri Kab. Jepara. Menjelaskan bahwa perkembangan Transportasi darat seperti perkembangan angkutan umum sangat pesat dari tahun ketahun, hal ini menuntut perkembangan dan kemajuan pula pada terminal sebagai salah satu prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menguat dan menurunkan orang dan atau barang,

seperti terminal bangsri yang termasuk Terminal Penumpang Tipe C terminal ini beralih fungsi menjadi Terminal Tipe B dimana Bus AKDP juga dilayani oleh Terminal Bangsri sehingga pengembangan terminal baik kapasitas maupun sarana dan prasarannya. Metode yang digunakan untuk menganalisis pengertian ini antara lain analisis karakteristik Parkir atau cara mencatat plat Nomor Angkutan umum yang masuk, parkir yang keluar terminal. Data diperoleh dari survey dilapangan menggunakan program Microsoft Excel. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang fasilitas yang ada di terminal, dan data yang diperoleh melalui obsefasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini objek yang diteliti yaitu pengembangan terminal penumpang terminal bangsri Kec. Bangri Kab. Jepara. Adapun Hasil dari penelitian dari Ferry Agus Saputra, perkembangan dan kemajuan pula pada terminal sebagai salah satu prasarana Tranportasi jalan untuk keperluan menguat dan menurunkan orang dan atau barang, seperti terminal bangsri yang termasuk terminal penumpang Tipe C terminal ini beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini hasil objek yang diteliti bahwa terminal bangsri sudah tidak dapat melayani lagi fungsinya sebagai terminal penumpang baik dari segi fasilitas maupun kafasitas dan cara pengembangannya memperluas lahan terminal.



### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Terminal Rajabasa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa menyatakan bahwa Terminal Induk Rajabasa adalah satu-satunya terminal tipe A di Provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung dan merupakan gerbang utama transportasi darat dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Terminal Rajabasa dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan dana APBN dan diresmikan oleh Bpk. Surharjono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan pada saat diresmikannya, Terminal Rajabasa masih termasuk wilayah administratif Lampung Selatan.<sup>91</sup> Adapun sejarah kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa**

No	Tahun Kepemimpinan	Nama Kepala terminal
1	1980-1993	Bpk. Nafsihi Tugiyono
2	1993-1994	Bpk. Sobri Martin
3	1994-2000	Bpk. Zainal Abidin
4	2000-2003	Bpk. Mega Sumbahan
5	2003-2004	Bpk. Munzir Ali
6	2004-2005	Bpk. Putu Yuasa
7	2005-2006	Bpk. Zaini, S. Sos.
8	2006-2011	Bpk. Ruslan Roni, SE
9	2011-2015	Bpk. Anthony Makki
10	2015-Sekarang	Bpk. Denny Widjan

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Adapun batas dari Terminal Rajabasa meliputi:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.
- b. Selatan berbatasan dengan Jalan Zainal Abidin PA.
- c. Timur berbatasan dengan Universitas Lampung.
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.<sup>92</sup>

## 2. Visi Misi Terminal Rajabasa

Pada dasarnya visi dan misi Terminal Rajabasa mengacu pada visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang merupakan induk organisasi dari Terminal Rajabasa. Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:  
Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu, aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:
  - 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
  - 2) Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan POSTEL yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
  - 3) Meningkatkan pelayanan jasa sektor perhubungan.
  - 4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

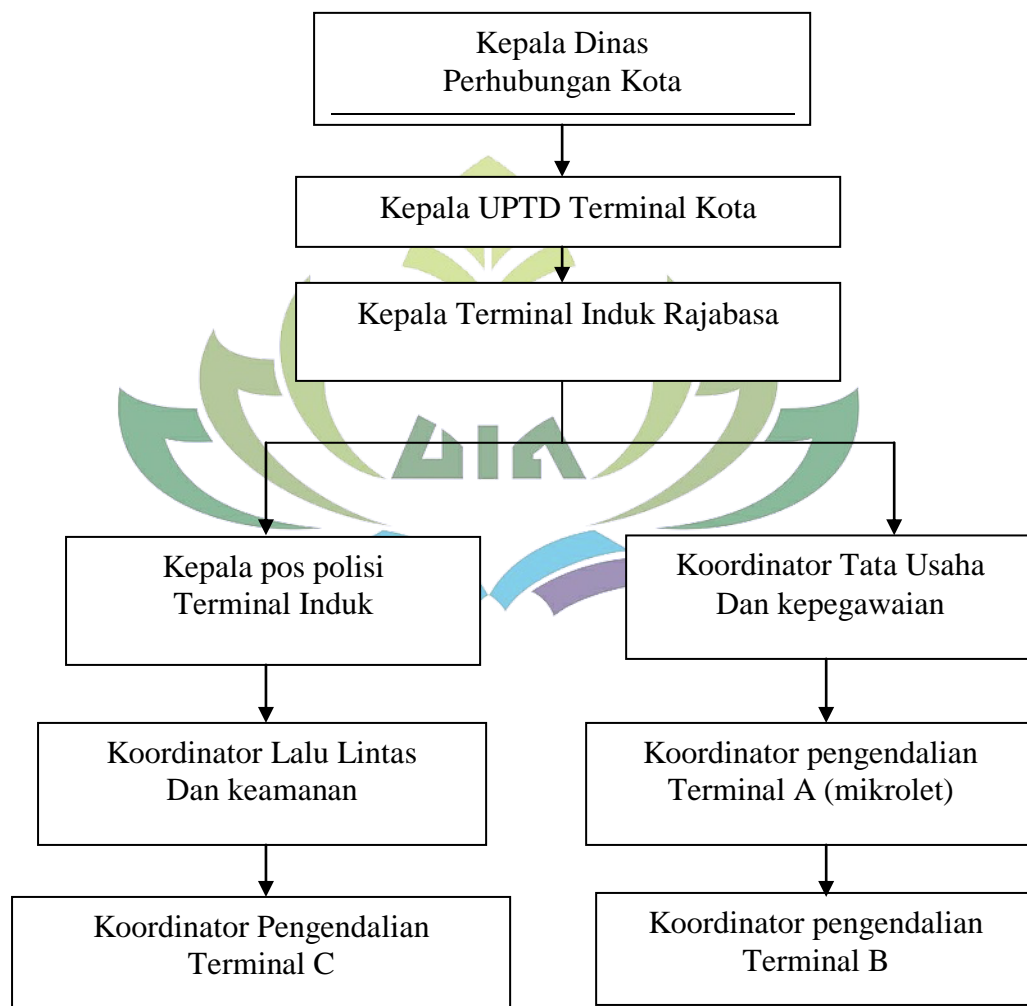
---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

- 5) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.<sup>93</sup>

### 3. Struktur Organisasi Terminal Rajabasa

Sesuai Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2008, maka struktur organisasi Terminal Induk Rajabasa adalah sebagai berikut



Gambar 1  
Struktur Organisasi Terminal Rajabasa.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Berdasarkan surat tugas Kepala Terminal Induk Rajabasa nomor 870/.../12/TRB/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Personil Terminal Induk Rajabasa, maka personil Terminal Induk Rajabasa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.  
Tugas Pokok dan Fungsi

No	Jabatan	Tugas Pokok
1	Kepala Terminal Induk Rajabasa	Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau tugas-tugas operasional personil serta administrasi Terminal Induk Rajabasa. Memimpin koordinasi jajaran terminal dengan instansi terkait.
2	Koordinator Tata Usaha dan Kepegawaian	a. Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan tugas-tugas kepegawaian, penyusunan program kerja, surat-menyurat, dan rumah tangga terminal. b. Membantu tugas kepala terminal dalam pengelolaan keuangan dan mengkoordinir pungutan terhadap objek PAD yang ada di dalam terminal.
3	Bendahara Terminal Induk Rajabasa	Membantu tugas Koordinator Tata Usaha dalam mencatat, membukukan, maupun mengumpulkan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran terminal.
4	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas serta Keamanan Terminal	Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan pengawasan pengamanan dan ketertiban arus lalu lintas dan warga masyarakat di dalam wilayah terminal.
5	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Terminal C (AKAP/AKDP)	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan AKDP / AKAP yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan, pengaturan timer dan jalur kendaraan, serta penertiban retribusi terminal.
6	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Terminal A (mikrolet/kendaraan umum)	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan mikrolet/ kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan, serta penertiban retribusi terminal.
7	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Terminal B	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan mikrolet/ kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan, serta penertiban retribusi terminal.

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa (2019).<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

<sup>95</sup> Database Terminal Induk Rajabasa (2019)

### B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa tipe A

Pada penyelenggaraanya, Terminal Induk Rajabasa memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa tipe A, yaitu:

Tabel 3.  
Fasilitas Utama Terminal Induk Rajabasa

No	Fasilitas Utama	Jumlah
1	Jalur Pemberangkatan Angkutan Umum	2
2	Jalur Kedatangan Angkutan Umum	2
3	Jalur Tunggu Angkutan Umum	1
4	Ruang Tunggu Penumpang	1
5	Kantor Terminal	1
6	Tempat Istirahat Sementara Kendaraan Umum	1
7	Menara Pengawas	Tidak ada
8	Loket Penjualan Tiket	60
9	Rambu, Papan Informasi	5
10	Pelataran Parkir Kendaraan Pengantar dan Taksi	Tidak ada

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa (2019).<sup>96</sup>

Tabel 4.  
Fasilitas Penunjang Terminal Induk Rajabasa

No	Fasilitas Penunjang	Jumlah
1	Kamar Kecil/ Toilet	4
2	Masjid	1
3	Kios/ Kantin	Tidak ada
4	Puskesmas Pembantu	1
5	Ruang Informasi dan Pengaduan	1
6	Telepon Umum	Tidak ada
7	Taman	1

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa (2019).<sup>97</sup>

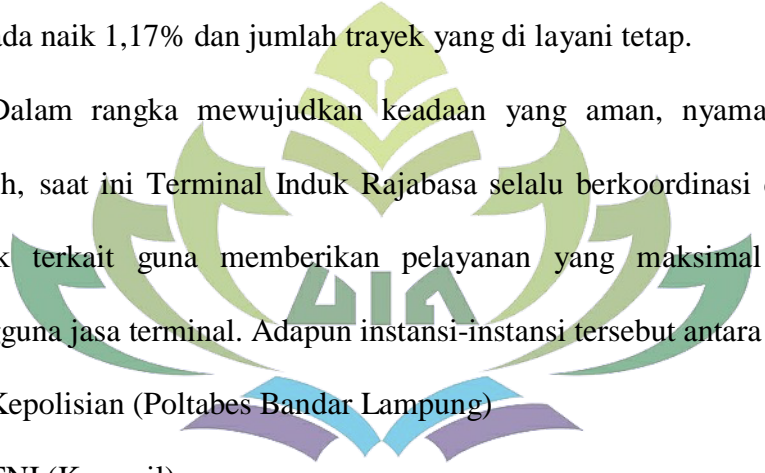
<sup>96</sup> Database Terminal Induk Rajabasa (2019)

<sup>97</sup> Database Terminal Induk Rajabasa (2019)

Jumlah perusahaan domisili Lampung yang memperoleh izin angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) sebanyak 23 perusahaan dengan jumlah armada 550 buah bus yang melayani 57 trayek. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah armada naik 10,77% dan jumlah trayek yang dilayani naik 3,5%.

Jumlah perusahaan yang memperoleh izin angkutan AKDP (Antar Kota Antar Daerah) sebanyak 87 perusahaan dengan jumlah armada 1.383 buah bus yang melayani 68 trayek. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, jumlah armada naik 1,17% dan jumlah trayek yang dilayani tetap.

Dalam rangka mewujudkan keadaan yang aman, nyaman, tertib, dan bersih, saat ini Terminal Induk Rajabasa selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna jasa terminal. Adapun instansi-instansi tersebut antara lain:

- 
- a. Kepolisian (Poltabes Bandar Lampung)
  - b. TNI (Koramil)
  - c. Kecamatan Rajabasa
  - d. Kelurahan Rajabasa
  - e. Jasa Raharja
  - f. Organda
  - g. Media cetak maupun elektronik



Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa tipe A sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Hingga saat ini fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di Terminal Induk Rajabasa sudah terpenuhi, hanya ada beberapa hal yang harus ditambahkan mengingat wilayah atau posisi terminal itu sendiri, belum ramah terhadap penumpang khusus seperti kaum difabel, sehingga pada tahun 2020 akan direncanakan untuk melakukan revitalisasi Terminal Induk Rajabasa untuk memenuhi Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan yaitu tentang ketertiban, kebersihan dan kenyamanan terminal penumpang tipe A. Secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang.<sup>98</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang, pengelolaan terminal tipe A diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan pihak terminal Rajabasa bertindak sebagai pengelola dan operator yang terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kenyamanan di Terminal Rajabasa. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan peningkatan kebersihan dan keamanan terminal. Untuk kebersihan ada 4 orang petugas khusus yang ditempatkan untuk menjaga kebersihan terminal. Sedangkan untuk keamanan pihak terminal melakukan kerjasama dengan pihak TNI dan Polri yaitu dengan menempatkan personil keamanan di Pos Keamanan yang ada di Terminal Rajabasa, jumlah personil yang ada hingga saat ini adalah 3 orang dan sudah dilengkapi dengan fasilitas CCTV.<sup>99</sup>*

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bayu selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.00-10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yono selaku salah satu Petugas

Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Pemerintah Provinsi Lampung memposisikan terminal sebagai salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun belum menyertakannya dengan penyelenggaraan terminal yang professional, sehingga daya tarik terminal dipersepsikan menurun menghadapi ancaman semakin maraknya terminal yang tidak resmi. Oleh karena itu dalam hal ini dibahas bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan terminal Rajabasa mulai dari keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi penumpang.<sup>100</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Barjo selaku salah satu Petugas

Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Pelaksanaan pengelolaan terminal Rajabasa mulai dari keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu pemerintah telah melakukan upaya penertiban terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa Provinsi Lampung dengan mengeluarkan regulasi tentang penertiban terminal tidak resmi dan larangan mobil pribadi (plat hitam) mengambil penumpang.<sup>101</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyati selaku pedagang di Terminal

Rajabasa menyatakan bahwa:

*Selama ini Terminal Rajabasa aman-aman saja dan sudah lumayan bersih, mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Terminal Raja terkenal rawan dan kumuh, saya sendiri sudah berjualan di Terminal Raja sejak tahun 1995 dan memang ini pekerjaan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya sendiri tidak mau berpindah meskipun ada relokasi tempat untuk para pedagang yaitu di lantai atas, karena jika pindah maka pendapatan yang saya terima jelas menurun karena memang kalau di lantai atas, sepi penumpang yang menunggu sehingga saya tetap bertahan di sini.<sup>102</sup>*

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Yono selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Barjo selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Supriyati selaku pedagang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-10.25 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haryanto selaku penumpang di Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Sebagai penumpang di Terminal Rajabasa ini saya merasa aman-aman saja saat ini dan untuk kebersihannya sudah cukup bersih dan tertata rapi, Memang sebelumnya terminal Rajabasa ini terkenal rawan dan kumuh, namun itu beberapa tahun yang lalu, berbeda dengan kondisi saat ini sudah jauh berbeda dan lebih tertata rapi.<sup>103</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yeni selaku penumpang di Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Saya sering menggunakan bus setiap berpergian. Menurut saya di terminal ini sudah cukup aman dan untuk kebersihannya lumayan bersih meskipun ada sebagian orang yang kurang kesadarannya dalam membuang sampah harus pada tempatnya. Dari tahun ketahun menurut saya terminal raja basa ini sudah ada perkembangan. Namun ada kekurangannya yaitu untuk fasilitas toilet kurang bersih dan kadang tidak ada air sehingga orang-orang yang ingin pergi ke toilet setelah perjalanan jauh jadi kecewa apalagi bagi para orangtua yang rentan kekamar mandi terus. Saya harap fasilitas toiletnya diperhatikan lagi demi kenyamanan penumpang yang menggunakan toilet.<sup>104</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Neti selaku penumpang di Terminal Rajabasa menyatakan bahwa:

*Jika ditanya tentang fasilitas bagi penumpang saat ini sudah cukup lengkap dan nyaman, hanya saja untuk fasilitas keamanan nya menurut saya harus diperketat lagi karena saya sendiri sebagai pengguna bus merasa kurang nyaman dengan adanya preman yang berkeliaran di daerah terminal. Para preman tersebut cukup mengganggu bagi penumpang yang sedang menunggu.<sup>105</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas, diketahui bahwa fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di Terminal

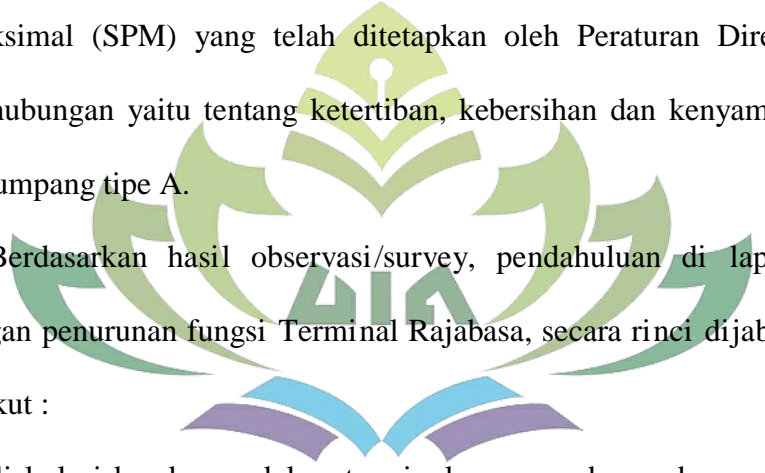
<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Haryanto selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 13.00-13.20 WIB.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Yeni selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 14.10-14.30 WIB.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Neti selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 15.20-15.45 WIB.

Induk Rajabasa sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung terutama tentang sarana dan prasarana di terminal Rajabasa tipe A mengingat wilayah atau posisi terminal itu sendiri belum ramah terhadap penumpang khusus seperti kaum difabel, sehingga pada tahun 2020 akan direncanakan untuk melakukan revitalisasi Terminal Induk Rajabasa untuk memenuhi Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan yaitu tentang ketertiban, kebersihan dan kenyamanan terminal penumpang tipe A.

Berdasarkan hasil observasi/survey, pendahuluan di lapangan terkait dengan penurunan fungsi Terminal Rajabasa, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

- 
- a. Sirkulasi kendaraan dalam terminal yang cenderung bercampur, termasuk pula penyalahgunaan fungsi ruang parkir.
  - b. Penataan *layout* fasilitas yang kurang tepat.
  - c. Kondisi fasilitas terminal yang kurang terawat.
  - d. Keberadaan kios-kios yang lebih mendominasi dan turut menciptakan kesan kumuh di lingkungan terminal.
  - e. Minimnya informasi yang ada, baik yang terkait dengan keberadaan fasilitas maupun kaitannya dengan kebutuhan perjalanan penumpang,

dalam hal ini informasi mengenai rute/trayek, jadwal perjalanan, dan tarif perjalanan.

- f. Minimnya ketersediaan rambu-rambu dan penerangan di malam hari.
- g. Kurangnya vegetasi di lingkungan terminal, terutama pada areal parkir kendaraan.
- h. Kurangnya pengawasan petugas terhadap aktivitas terminal, yang mana keberadaan petugas lebih terfokus pada urusan penarikan retribusi.
- i. Kurangnya kesadaran hukum terhadap tim pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap supir angkutan, dan masih kurangnya kesadaran baik bagi para supir angkutan serta para calon penumpang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga para supir angkutan terminal Rajabasa sering melakukan pelanggaran yang sama dan calon penumpang terminal Rajabasa sering tidak masuk ke dalam terminal sehingga mengambil angkutan di terminal tidak resmi.
- j. Ketidaknyamanan penumpang terkait dengan keberadaan calo, buruh angkut, dan pedagang asongan di sekitar fasilitas terminal.
- k. Ketidakdisiplinan para pengemudi/operator yang lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal, seperti di terminal tidak resmi pada sepanjang ruas jalan di terminal Rajabasa dan di *pool-pool* agen.<sup>106</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi Terminal

---

<sup>106</sup> Database Terminal Induk Rajabasa (2019)

Rajabasa, secara umum dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yakni sebagai berikut:

- a. Aspek lokasi, site/tapak, sistem aksesibilitas dan sirkulasi, serta fasilitas terminal (tata *layout*, kemudahan akses, dan kondisi fasilitas).
- b. Aspek Manajemen, penyelenggaraan terminal yang tidak maksimal baik dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan maupun penertiban dan masih kurangnya kesadaran hukum terhadap tim pengawas, supir angkutan dan calon penumpang terminal Rajabasa.
- c. Aspek Operasional, indisipliner pengemudi/operator dalam menggunakan terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, dengan beberapa indikasi diantaranya : fenomena terminal yang tidak resmi, fenomena kendaraan plat hitam yang turut serta mengambil penumpang, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan dari fenomena terminal tidak resmi dan fenomena plat hitam turut serta mengambil penumpang, dalam observasi di lapangan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawas pengelolaan terminal Rajabasa Bandar Lampung, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab

Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab yang kebanyakan pemilik mobil yang melakukan tindakan pelanggaran dalam hal ini mobil pribadi (plat hitam). Faktor penghambat pelaksanaan pengawas dalam penertiban Terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa



Bandar Lampung adalah adanya oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab sebagai pemilik kendaraan pribadi (plat hitam) sehingga kepolisian sangat sulit untuk melakukan penindakan.

Faktor penghambat pelaksanaan pengawas dalam penertiban terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa Bandar Lampung yaitu sebagian besar kendaraan yang melakukan pelanggaran menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal adalah milik oknum pejabat dan membuat para petugas penertiban terminal tidak resmi tidak akan terselesaikan. sebaiknya oknum pejabat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menghilangkan berbagai masalah yang ada di daerah tersebut.

b. Banyaknya buruh angkut

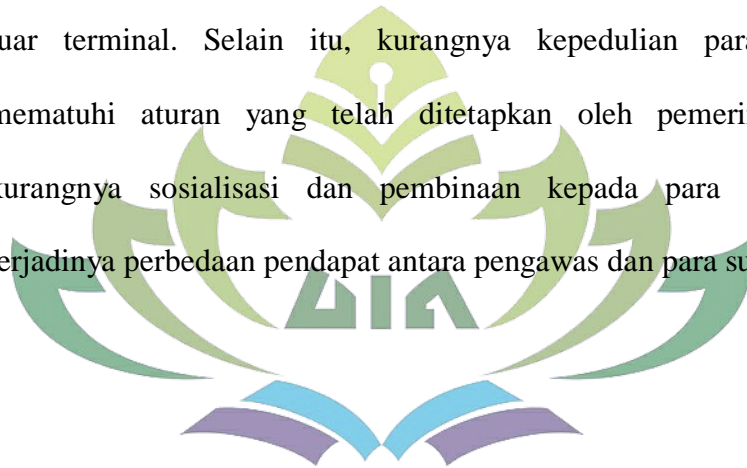
Banyaknya buruh angkut yang dimaksud adalah banyaknya buruh yang mengangkat barang penumpang yang ingin masuk ke dalam terminal, hal ini sangat meresahkan penumpang dan biasa ada penumpang yang tidak ingin menggunakan jasa angkut tetap dipaksa. Sebagian besar calon penumpang mengatakan bahwa dia tidak ingin masuk ke dalam terminal karena banyaknya buruh yang menawarkan jasanya untuk mengangkat barang penumpang yang ingin masuk kedalam terminal dan bahkan para penjual jasa angkut ini sering memaksa calon penumpang untuk menggunakan jasa angkut.

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorang penumpang Terminal Rajabasa bahwa sebagian besar calon penumpang tidak ingin masuk ke dalam terminal karena buruh angkut juga sering memperebutkan barang atau tas penumpang ketika turun dari mobil angkutan kota dan buruh angkut juga sering meminta bayaran yang mahal kepada penumpang sehingga yang membuat calon penumpang lebih memilih menunggu mobil angkutan yang berada di luar terminal Rajabasa.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pengawas dalam penertiban terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa Bandar Lampung adalah adanya oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab sebagai pemilik kendaraan pribadi (plat hitam), banyaknya retribusi yang harus dibayar oleh supir dan penumpang serta banyaknya buruh angkut yang berkeliaran di dalam terminal sehingga membuat keresahan kepada calon penumpang sehingga penumpang lebih memilih naik mobil angkutan yang berada di luar terminal.

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat membantu pelaksanaan pengawas dalam menertibkan Terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa Bandar Lampung yaitu tim terpadu. Dengan adanya tim terpadu yang dibuat oleh pemerintah menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengawas dalam penertiban terminal tidak resmi di kawasan terminal Rajabasa Bandar Lampung sehingga, sangat membantu dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pengelolaan terminal Rajabasa masih kurang efektif jika dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang, hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan daerah, dinas perhubungan dan polisi lalu lintas serta kurang efektifitasnya sanksi yang diberikan petugas terhadap supir angkutan sehingga para supir sering melakukan pelanggaran yang sama yaitu dengan leluasa mengambil penumpang di luar terminal. Selain itu, kurangnya kepedulian para supir dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kemudian kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada para supir sehingga terjadinya perbedaan pendapat antara pengawas dan para supir angkutan.



## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 22 ayat (3) Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A**

Arus transportasi penumpang yang semakin padat dan kuantitas dari pengguna moda angkutan transportasi darat antar kota dan Provinsi yang semakin berkembang baik dalam kota ataupun antar kota, Terminal Induk rajabasa adalah satu-satunya terminal Tipe A diprovinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung dan merupakan gerbang utama transportasi darat dari pulau sumatra menuju pulau jawa dan sebaliknya.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dalam sebagai aspek kehidupan haruslah memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam bidang transportasi guna memperlancarnya akses bagi masyarakat dalam beraktifitas.

Tingkat mobilitas yang tinggi serta desakan infrastruktur transportasi yang memadai menyebabkan pemerintah daerah sebagai abdi masyarakat terdorong untuk merespon kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 22 ayat (3) Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Penumpang Rajabasa Tipe A saat ini sudah terlaksana namun belum sepenuhnya masih ada fasilitas-fasilitas yang di terminal tersebut tidak layak pakai untuk para

penumpang yang sedang transite di terminal seperti fasilitas toilet, status Terminal Induk Rajabasa sebagai Terminal Induk Provinsi Lampung yang menyediakan jasa angkutan penumpang ternyata belum sesuai dengan harapan sebagai Induk atau sentral terminal dari Perhubungan darat yang berorientasi pada distribusi penumpang.,

Hal ini dapat dilihat dari fasilitas Terminal Penumpang yang semeraut dan berbagai permasalahan fasilitas terminal seperti fasilitas toilet yang ada di terminal Rajabasa Tipe A menurut pengamatan penulis sudah tidak layak untuk digunakan karena air yang didalam kamar mandi terkadang kosong, pintu kamar mandi sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi, lantai yang licin sehingga membuat orang yang ingin menggunakan toilet tersebut merasa kurang nyaman. Toilet umum yang berjumlah 2 lokasi hanya 1 lokasi yang masih berfungsi selain fasilitas toilet penulis juga lebih fokus kepada fasilitas keamanan, kebersihan, dan fasilitas perdagangan. Selain itu terdapat fasilitas tambahan seperti, televisi, kamera video, alat pemadam kebakaran, dan *container* sampah.

Fasilitas tambahan tersebut berasal dari APBD Dishubkominfo, Fasilitas yang tersedia di terminal Rajabasa kondisinya memprihatkan dan tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian, kursi ruang penumpang kondisinya juga mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat 1 (satu) set kursi berada di ruang tunggu penumpang, kondisinya pecah terdapat kursi yang hilang, dapat mengganggu kenyamanan penumpang dalam menunggu kedatangan bus. Serta papan pengumuman yang berada di ruang tunggu kedatangan bus ini tidak

menyediakan informasi mengenai kedatangan dan keberangkatan bus bagi penumpang. Tidak adanya informasi pada papan pengumuman menyebabkan tidak adanya kepastiaan bagi penumpang dalam menunggu kedatangan maupun keberangkatan bus yang berada di terminal Rajabasa.

Hasil dari wawancara dengan berbagai instansi terkait bahwa untuk masalah kebersihan memang masih kurang tenaga kerja karena tenaga kerja yang saat ini di terminal Rajabasa hanya ada 4 orang dan kemungkinan besar untuk membersihkan seluruh lingkungan yang ada di terminal Rajabasa tidak memungkinkan. Dari berbagai kekurangan yang ada di terminal Rajabasa tersebut, pihak terminal akan melakukan perbaikan-perbaikan baik di bidang infrastruktur maupun penambahan karyawan kerja guna kenyamanan di terminal.

Adapun fungsi Terminal Yaitu sebagai media transportasi masyarakat dalam mengaksessarana angkutan umum (penumpang) menjadikan terminal penting untuk dikelola secara profesional dengan berbagai macam fasilitas pendukung kenyamanan bagi penggunanya. Banyaknya terminal di provinsi Lampung merupakan aset penting daerah yang harus dikelola dengan baik agar dalam pemanfaatannya bisa tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan baik manakala masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya yang mudah, waktu yang cepat, dan masyarakat sedikit atau hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi semacam ini hanya dapat diwujudkan manakala organisasi publik.

Berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Menjelaskan tentang Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal. Melihat dari segi sarana dan prasarana di terminal Tipe A Rajabasa minim dan kurang memadai, karena beberapa alasan seperti kebijakan pengelolaan masih dilakukan oleh petugas Pegawai Dinas Perhubungan UPTD Terminal Rajabasa menjadi kurang maksimal/ tidak optimal baik fasilitas utama dan fasilitas penunjang dikarenakan dari pihak pengelola masih dari dinas perhubungan bukan berasal dari Dirjen Perhubungan bukan yang seharusnya mengelola terminal tipe A. Secara keseluruhan masalah dalam penelitian dapat diambil kesimpulan dari 2 (2) aspek yakni sebagai berikut:

Aspek perencanaan dan aspek perancangan, meliputi lokasi, sistem aksesibilitas dan sirkulasi, serta fasilitas utama dan penunjang terminal (tata layout, kemudahan akses, dan kondisi fasilitas).

Aspek manajemen, penyelenggaraan terminal yang tidak maksimal baik dalam hal pengelolaan yang masih dikelola oleh dinas perhubungan kota Bandar Lampung yang kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, biaya operasional pemeliharaan/perawatan, maupun penertiban.



**B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah***

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub Nomor 132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang sangat berkaitan dengan kaidah *good governance* berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang

harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Untuk dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ لَشُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas, adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan.

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*). Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yaitu terdapat didalam Qs.An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (*ulil amri*). Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT artinya pengelolaan terminal Bus tipe A harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam penyediaan fasilitas terminal penumpang yang aman, nyaman dan sesuai dengan harapan penumpang di terminal.

Pelaksanaan pengelolaan terminal Rajabasa masih kurang efektif jika dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang,

Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan daerah, Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di Terminal Induk Rajabasa sudah terpenuhi, hanya ada beberapa hal yang harus ditambahkan mengingat wilayah atau posisi terminal itu sendiri, belum ramah terhadap penumpang khusus seperti kaum difabel, sehingga pada tahun 2020 akan direncanakan untuk melakukan revitalisasi Terminal Induk Rajabasa untuk memenuhi Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan yaitu tentang ketertiban, kebersihan dan kenyamanan terminal penumpang tipe A kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan.

Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah dengan sedekah. Adapun ayat yang mengatur tentang pentingnya menjaga kebersihan yaitu terdapat dalam hadits Riwayat At-Tirmidzi dari saad yang artinya “sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih, (suci) dan mencintai kebersihan, mulai dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai kebagusan bersihnyalah rumahmu”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang sudah dilaksanakan tetapi pada pelaksanaannya masih belum memadai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung terutama tentang sarana dan prasarana di terminal Rajabasa tipe A. Ada beberapa fasilitas-fasilitas di terminal yang tidak layak pakai untuk para penumpang yang sedang transit di terminal seperti fasilitas toilet, Lingkungan yang kurang bersih, keamanan yang kurang memadai dan pertokoan yang kurang tertata sehingga membuat para penumpang kurang nyaman berada di terminal tersebut.
2. Implementasi Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang fasilitas terminal penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A ditinjau dari *Fiqh Siyasah* yaitu seorang pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya yang terdapat didalam QS. An-Nisa: ayat 58. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan,

diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia-akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seorang pemimpin dalam konsep *Al-Ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar *Syari'ah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk pengelola Terminal Raja Basa tipe A, perlu adanya kesadaran bersama untuk menjalankan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang, agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang serta meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Raja Basa.
- b. Bagi Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan masif tentang Fasilitas Terminal Penumpang agar semua pihak fasilitas yang harus disediakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan yang lebih penting pengawasan di lapangan secara menyeluruh dan berkala, tidak hanya pada momen tertentu saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abduk Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004)

Abdul Qadir Audah, “*Al islam Wa Audlo’una Asiyasiyah Darul Qitab Al Arabi*” Al Qhahirah, 1951

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*

Abu bakar, dkk. *Menuju Lalu Lintas yang Tertib. Kumpulan Materi & Petunjuk Teknis Lalu Lintas & Angkutan Jalan.* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2005),

Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006)

Al Mawardi, “*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*”, Musthafa al-‘Arabi al-Halabi, Mesir

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2

Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, terjemahan Ibrahim Syu’aib, *Etika Agama dan Dunia*

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.)

Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum cetakan ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012)

Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006)

Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004)

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Departemen Agama Qur’an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987)

- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. 1
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *fiqh siyasah; Doktrin dan pemikiran politik islam*.(Jakarta: Erlangga, 2008)
- Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*
- Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1994)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung:Alimni, 1986),
- Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2004. *Standart Toilet Umum Indonesia “Kering Itu Sehat”*.
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Moh. Pabundatika, *Metodelogi Ristrach Bisnis* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006)
- Muchtar Affandi, “*ilmu-ilmu kenegaraan*”, (Bandung: Alumni, 2014),
- Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V, Dar al- Fikr*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*
- Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung Manjar Maju, 2002)

- Setyawan, Ebta. 2011. *KBBI Offline Versi 1.2*. <http://ebtasoft.web.id>
- Sigiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan ke-3, (Bandung:Alfabet, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Renika Cipta, 2010).
- Sutrisno dan Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),
- T.M. Hasbi Siddiqy, “*Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*” Matahari Masa Yogya, 1969,
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan)*. (Jakarta:: LP3ES: 2008),
- Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayu Media, 2011),
- Yusuf Musa, “*Nidham al-Hukmi fi al-Islam*”, Darul Kitabil Arabi, al-Qhahirah, 1963,
- JURNAL:**
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi, Mishr 1389/1979*,
- Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi. 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition. International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2012]
- Christmas T.S. Kandau, Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No. 1, Januari 2019,
- Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298. Yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994),
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor. Kencana, 2003)

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bayu selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.00-10.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Yono selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Barjo selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Supriyati selaku pedagang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-10.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Haryanto selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 13.00-13.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Yeni selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 14.10-14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Neti selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 15.20-15.45 WIB.

### **Sumber On-Line**

Lubis, Hendra Arief K.H. 2008. *Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka*. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/4350/1/09E00136.pdf>

Prasetya Sushernawan, *Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014, :<http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abduk Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004)

Abdul Qadir Audah, “*Al islam Wa Audlo’una Asiyasiyah Darul Qitab Al Arabi*” Al Qhahirah, 1951

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*

Abu bakar, dkk. *Menuju Lalu Lintas yang Tertib. Kumpulan Materi & Petunjuk Teknis Lalu Lintas & Angkutan Jalan.* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2005),

Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006)

Al Mawardi, “*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*”, Musthafa al-‘Arabi al-Halabi, Mesir

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet. 2

Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, terjemahan Ibrahim Syu’aib, *Etika Agama dan Dunia*

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.)

Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum cetakan ke-6*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012)

Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Rajawali Grafido Persada, 2006)

Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004)

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Departemen Agama Qur’an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987)

- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. 1
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *fiqh siyasah; Doktrin dan pemikiran politik islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*
- Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1994)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana, 2011)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung:Alimni, 1986),
- Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2004. *Standart Toilet Umum Indonesia “Kering Itu Sehat”*.
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Moh. Pabundatika, *Metodelogi Ristrach Bisnis* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006)
- Muchtar Affandi, “*ilmu-ilmu kenegaraan*”, (Bandung: Alumni, 2014),
- Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V, Dar al- Fikr*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Muhammad Iqbal, *Pemikiran politik islam dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*
- Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung Manjar Maju, 2002)



- Setyawan, Ebta. 2011. *KBBI Offline Versi 1.2*. <http://ebtasoft.web.id>
- Sigiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Cetakan ke-3, (Bandung:Alfabet, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Renika Cipta, 2010).
- Sutrisno dan Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),
- T.M. Hasbi Siddiqy, “*Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*” Matahari Masa Yogya, 1969,
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan)*. (Jakarta:: LP3ES: 2008),
- Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayu Media, 2011),
- Yusuf Musa, “*Nidham al-Hukmi fi al-Islam*”, Darul Kitabil Arabi, al-Qhahirah, 1963,
- JURNAL:**
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi, Mishr 1389/1979*,
- Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi. 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition. International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2012]
- Christmas T.S. Kandau, Perencanaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No. 1, Januari 2019,
- Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, h. 298. Yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994),
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor. Kencana, 2003)



### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Denny Widjan selaku Kepala Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bayu selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.00-10.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Yono selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Barjo selaku salah satu Petugas Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-11.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Supriyati selaku pedagang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 11.00-10.25 WIB.

Hasil wawancara dengan Haryanto selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 13.00-13.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Yeni selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 14.10-14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Neti selaku penumpang di Terminal Rajabasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 15.20-15.45 WIB.

### **Sumber On-Line**

Lubis, Hendra Arief K.H. 2008. *Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka*. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/4350/1/09E00136.pdf>

Prasetya Sushernawan, *Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014, :<http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)